



Foto: Humas Lemhannas RI

Presiden Joko Widodo berikan Pembekalan kepada Peserta PPRA LIV dan LV Lemhannas RI

Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo memberikan pembekalan kepada peserta PPRA LIV dan LV Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Rabu (2/11). Seluruh peserta telah melalui rangkaian kegiatan pendidikan di Lemhannas RI seperti Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Olah Sistem Manajemen Nasional, Taskap, dan Seminar Nasional. (selengkapnya hal. 6)



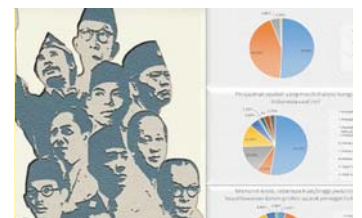
4 Lemhannas RI lakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI



8 Kunjungan Delegasi *National Management Course* (NMC) Pakistan ke Lemhannas RI



9 Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan LV Lemhannas RI



10 Lemhannas RI Selenggarakan Jajak Pendapat mengenai Nilai-Nilai Kepahlawanan

Daftar Isi

- 2 Kunjungan ISTMI ke Lemhannas RI
- 3 Lemhannas RI-BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kerja Sama
- 4 Lemhannas RI lakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI
- 5 Audiensi LAFINUS dengan Lemhannas RI
- 6 Presiden Joko Widodo berikan Pembekalan kepada Peserta PPRA LIV dan LV Lemhannas RI
- 7 Penataran Isteri dan Suami Peserta PPRA LV Lemhannas RI
- 8 Kunjungan Delegasi NMC Pakistan ke Lemhannas RI
- 9 Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LV Lemhannas RI
- 10 Lemhannas RI Selenggarakan Jajak Pendapat mengenai Nilai-Nilai Kepahlawanan
- 12 Upacara Peringatan Hari Pahlawan

Tim Redaksi:

Pengarah:

Arif Wachyunadi

Penanggung Jawab:

E. Estu Prabowo

Redaktur Pelaksana:

Wahyu Widji Pamungkas

Penyunting/Editor:

Bambang Iman Aryanto

Staf Redaksi:

Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona

Permatasari, Magista Dian Fitriilia

Desain:

Bambang Iman Aryanto

Fotografer:

Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto

Sekretariat:

Linda Purnamasari, Gatot, Indiah Winarni

Distribusi:

Supriyono, Ayu Novitasari

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI,

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

Kunjungan Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia (ISTMI) ke Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia (ISTMI) yang diwakili oleh Ketua Umum ISTMI Faizal Safa, Sekretaris Jenderal ISTMI Andre Mulyana dan Bendahara Umum ISTMI M.Ghazali, melakukan kunjungan ke Lemhannas RI. Kunjungan ini disambut oleh Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. di Ruang Rapat Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI pada Selasa (11/10).

Dalam kunjungan tersebut, perwakilan ISTMI bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan Lemhannas RI dalam program CLIC yang dibentuk oleh ISTMI dan BKS BUMDSI yang dilaksanakan untuk mendukung ketahanan industri di Indonesia. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, ISTMI berharap Lemhannas RI dapat memberikan dukungan narasumber dari Lemhannas RI dalam rangka program pembangunan karakter bangsa.

Deputi Pengkajian Strategik mewakili Gubernur Lemhannas RI menanggapi hal tersebut dengan positif program yang sedang dijalankan oleh ISTMI. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut adalah program yang bagus karena tercetus dari sebuah keprihatinan akan kondisi industri saat ini. Kunjungan ini ditutup dengan Foto Bersama antara Jajaran ISTMI dan Lemhannas RI.



Lemhannas RI-BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kerja Sama

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. menerima Audiensi BPJS Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Direktur Utama Bapak Agus Susanto dengan didampingi Direktur Umum dan SDM Bapak Naufal Mahfudz beserta jajarannya pada Selasa (11/10), di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lt. I, Lemhannas RI.

Dalam audensi ini Agus Susanto mendiskusikan mengenai pengembangan *human capital* dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Agus menginginkan para karyawan harus dibekali dengan tentang moral dan etika kebangsaan serta wawasan nusantara sehingga memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sesuai karakter bangsa.

Agus Susanto menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki sebuah lembaga yang menyelenggarakan *Internal Training*. Berkaitan dengan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat mendatangkan pemateri

dari Lemhannas untuk mengajar di institut BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada para karyawan.

"Kami Ingin membangun suatu sinergi dengan Lemhannas RI yang pertama di dalam bidang pendidikan dan kedua di dalam program jaminan sosial sesuai dengan fokus kerja dari pemerintah mengenai kesejahteraan," lanjut Agus.

Menanggapi positif ajakan kerjasama tersebut, Gubernur Lemhannas RI mengharapkan bahwa kerja sama yang terjalin dalam bentuk pelatihan pelatihan dan pembekalan diantara dua institusi ini yang nantinya dapat menyadarkan masyarakat khususnya pegawai swasta dan PNS akan pentingnya jaminan sosial sekaligus juga mampu memperkuat karakter komponen bangsa.

Audiensi ini kemudian ditutup dengan pemberian cinderamata oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Gubernur Lemhannas RI dan sesi foto bersama.

Lemhannas RI lakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI



Bertempat di Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II DPR RI, Lemhannas RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI dalam rangka Pembahasan Penyesuaian RKA KL pada Selasa (19/10). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. TB Hassanuddin, SE, MM dan dihadiri oleh anggota Komisi I DPR RI.

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI membahas pagu anggaran Lemhannas RI tahun 2017. Lemhannas RI yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. menjelaskan mengenai alokasi penggunaan pagu anggaran 2017 tersebut. Ia mengatakan bahwa Lemhannas RI memiliki 3 program rencana kerja pada tahun 2017 yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur, dan program pengembangan

ketahanan nasional yang dibagi dalam tiga ke deputian.

Selain itu, pada tahun 2017, Lemhannas RI akan melaksanakan program kegiatan prioritas nasional yang mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2017. Program prioritas nasional yang akan dilaksanakan Lemhannas adalah program peneguhan jati diri dan karakter bangsa. Program tersebut akan direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan pendidikan berbasis karakter calon pimpinan tingkat nasional seperti PPSA, PPRA, dan P3DA. Lebih lanjut, program peneguhan jati diri dan karakter bangsa lainnya adalah pelaksanaan *Training of Trainers* dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi para pendidik dan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia.

Selain dengan Lemhannas RI, Komisi I juga mengundang LPP RRI, Bakamla RI, dan LPP TVRI untuk melakukan Rapat dengar pendapat.



Foto : Humas Lemhannas RI

Audiensi LAFINUS dengan Lemhannas RI

Perwakilan Laboratorium Filsafat Nusantara (LAFINUS) melakukan audiensi ke Lemhannas RI. Kunjungan ini disambut oleh Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi Deputi Bidang Pengkajian Strategik Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr., Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc. serta Taprof Bidang Sosial Budaya Dr. Anhar Gonggong di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI pada Selasa (25/10).

Dalam kunjungannya, Ketua LAFINUS Rizal Mustamsyir mewakili LAFINUS bermaksud mengundang Lemhannas RI untuk menjadi pemateri dalam Konferensi Internasional tentang Perpaduan Kearifan Lokal dengan Ketahanan Ideologi pada tanggal 1-2 November 2016.

Acara yang akan dilaksanakan selama dua hari ini turut mengundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai keynote speaker yang akan membahas tentang kearifan lokal dan Gubernur Lemhannas RI diharapkan dapat menjadi keynote speaker untuk membahas tentang ketahanan ideologi.

Gubernur Lemhannas RI menanggapi positif program yang akan dilaksanakan LAFINUS. "Konferensi ini sangat bagus, konkret karena menggandeng semuanya," ujar Gubernur.

LAFINUS berharap Gubernur Lemhannas RI dapat mendukung program melestarikan kearifan lokal yang dirasa mulai punah dan dianggap primitif. Audiensi ditutup dengan pemberian cinderamata dan sesi foto bersama.



Presiden Joko Widodo berikan Pembekalan kepada Peserta PPRA LIV dan LV Lemhannas RI

Presiden Joko Widodo memberikan pembekalan kepada peserta PPRA LIV dan LV Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Rabu (2/11) di Istana Negara, Jakarta.

Acara diawali dengan laporan Gubernur Lemhannas RI kepada Presiden Joko Widodo. Dalam laporannya, Agus Widjojo menyampaikan bahwa para peserta pembekalan ini berasal dari alumni PPRA LIV sejumlah 107 dan peserta Aktif PPRA LV berjumlah 103.

Seluruh peserta telah melalui rangkaian kegiatan pendidikan di Lemhannas RI seperti Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Olah Sistem Manajemen Nasional, Taskap, dan Seminar Nasional.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan paparan hasil Seminar Nasional yang telah dilakukan peserta PPRA LIV dan LV. Pada sesi pertama, perwakilan Alumni PPRA LIV, Laksamana Muda TNI Oktavian, memaparkan mengenai pariwisata di Indonesia.

Sedangkan pada sesi kedua, Sempa Ari Sitepu mewakili peserta PPRA LV memaparkan mengenai kedaulatan energi di Indonesia.

Setelah pemaparan, acara kemudian dilanjutkan dengan pembekalan oleh Presiden Joko Widodo. Joko Widodo mengatakan terdapat tiga pertarungan global yang akan dihadapi Indonesia yaitu perebutan energi, perebutan pangan, dan perebutan air. Saat ini Indonesia telah memiliki potensi, namun belum dikelola dengan baik.

Jika Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN tidak dapat memenuhi tiga hal tersebut, akan memberikan dampak yang buruk kepada negara ASEAN lainnya. Namun, jika Indonesia dapat memenuhi tiga hal tersebut, Indonesia dapat menjadi rujukan negara-negara lain khususnya ASEAN. "Ini bisa menjadi sebuah kekuatan, bisa menjadi sebuah potensi tetapi bisa juga menjadi sebuah masalah kalau kita tidak merencanakan, menyiapkan mulai dari sekarang," ungkap Joko Widodo.

Pada sektor ekonomi, adanya penurunan harga komoditas.

Penataran Isteri dan Suami Peserta PPRA LV Lemhannas RI

Selama ini, beliau mengatakan, Indonesia masih terpaku kepada menjual sumber daya alam dan bahan mentah namun tidak menyiapkan alat-alat produksi maupun hilirisasi dengan baik. Selain itu, Joko Widodo juga memaparkan mengenai posisi Indeks daya saing di ASEAN dan Global yang masih cukup jauh dari target. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan Indonesia ke depan.

“Ini adalah tantangan kita ke depan. Kuncinya sebenarnya ada di sumber daya manusia, nggak ada yang lain, SDM, kualitas SDM,” tegas Joko Widodo.

Indonesia, lanjut Joko Widodo, tidak kalah bersaing dengan negara lain dalam hal kepandaian sumber daya manusia. Namun, hal tersebut berkaitan erat dengan membangun kultur politik, kulturekonomi, dan kultur hukum yang baik.

Tantangan yang lain adalah jumlah penduduk yang masih cukup banyak walaupun mengalami penurunan pada tahun 2016 ini. Kemudian adanya ketimpangan harga di beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut, tentu tidak sesuai dengan sila Ke-5 Pancasila. “Saya ingatkan sila Ke-5 agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Joko Widodo.

Kemudian, pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia dan daerah perbatasan juga terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Bandara - Bandara dan Pelabuhan - Pelabuhan besar maupun kecil juga terus diperbaiki. Dengan perbaikan infrastruktur dan konektivitas antar pulau tersebut, Joko Widodo berharap Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

“Dengan pondasi infrastruktur inilah kita nanti bisa bersaing. Kalau kita merasakan pahit, gapapa kita telan pahitnya dulu. Tapi saya meyakini pada titik tahun tertentu nanti kita akan merasakan manfaat dari pondasi yang kita bangun ini,” jelas Joko Widodo.

Pada akhir pembekalan, Joko Widodo juga menegaskan akan melakukan deregulasi peraturan dan juga memajukan pariwisata yang akan dimulai sedikit demi sedikit.

Dalam pembekalan yang ditutup dengan sesi foto bersama tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Wiranto, Kasum TNI Laksamana Madya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.



“**P**enyakit yang berkembang dalam tubuh kita berasal dari gaya hidup yang diterapkan oleh orang itu sendiri, faktor keturunan hanya berperan sebanyak dua persen saja,” ujar Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum. pada kegiatan Perista Lemhannas RI berjudul “Cara Cerdas Indonesia Sehat” di Ruang Gadjah Mada Lemhannas RI, Selasa (1/11).

Kegiatan yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Penataran Isteri/Suami Peserta PPRA LV T.A. 2016 ini dihadiri oleh Ketua Perista Ibu Ninik Agus Widjojo dan diikuti oleh 86 anggota perista.

Pada kesempatan ini Dokter Tan menjelaskan tentang pemahaman bagaimana cara menjalankan dan menerapkan pola hidup sehat.

Dokter Tan juga menjelaskan beberapa macam penyakit yang paling sering di alami di negara berkembang seperti diabetes, kanker, jantung dan *stroke*. “75 persen penyakit jantung, *stroke* hingga kanker terjadi di negara berkembang yang masih memiliki pola hidup tidak sehat, yang masyarakatnya masih mengonsumsi makanan yang hanya mereka suka bukan yang tubuhnya butuhkan,” jelasnya.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan ucapan terima kasih Dokter Tan selaku narasumber kepada Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan untuk dapat berbagi ilmu kepada peserta penataran.

Kunjungan Delegasi *National Management Course (NMC)* Pakistan ke Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Delegasi *National Management Course (NMC)* Pakistan yang dipimpin oleh Iram Adnan mengunjungi Lemhannas RI pada Rabu (2/11). Kunjungan NMC diterima oleh Kepala Biro Kerjasama Brigjen Ivan Ronald Pelealu, S.E. dan Taprof Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P. beserta pejabat Lemhannas RI lainnya di Ruang Gatot Kaca Gedung Astagatra.

NMC merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh *National Management College* Pakistan yang bertujuan untuk membangun kapasitas pejabat senior dari Layanan Sipil Federal dan Provinsi, negara-negara sahabat, angkatan bersenjata dan eksekutif senior dari sektor swasta sebagai peserta didik mengenai faktor-faktor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dalam rangka mempersiapkan peserta untuk penugasan pada posisi yang lebih tinggi di masa mendatang.

National Management College sendiri merupakan bagian dari *National School of Public Policy (NSPP)* Pakistan yang merupakan institusi pelatihan dan pendidikan pegawai negeri sipil di Pakistan.

Delegasi NMC mengunjungi Lemhannas RI bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan mengenai sejarah sosial ekonomi dan keamanan Indonesia.

Sebagai pemapar awal, Dr. Panutan S., SE, MT, Ak. Taprof Bidang Ekonomi berbagi mengenai lesson learned dari Sejarah Ekonomi Indonesia. Dr. Panutan S., SE, MT, Ak. Taprof Bidang Ekonomi berbagi pengetahuan tentang perkembangan ekonomi Indonesia mulai dari era kemerdekaan hingga saat ini. "Paska kemerdekaan, Indonesia

lebih terfokus pada isu sosial politik sehingga bidang perekonomian cenderung dikesampingkan," ujar Dr. Panutan.

Sesudah tahun 1967, lanjut Dr. Panutan, perekonomian mulai membaik meskipun tetap bergantung pada komoditas seperti minyak, kayu, batu bara, dan minyak sawit mentah. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah ekonomi Indonesia, lanjut Dr. Panutan, dilihat dalam 3 (tiga) aspek yaitu Geografi, Keterbukaan Ekonomi, dan aspek kelembagaan.

Sesi selanjutnya merupakan pemaparan oleh Tenaga Profesional Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI Ambassador Sebastianus Sumarsono, S.I.P. dari segi keamanan Indonesia.

Ambassador Sebastianus menceritakan sejarah keamanan Indonesia sejak perjuangan kemerdekaan, termasuk pembentukan Tentara Nasional Indonesia. "Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berupa perjuangan fisik namun juga ada perjuangan secara politik," jelas Ambassador Sebastian kepada Peserta Angkatan ke 105 NSPP NMC.

Lebih lanjut Ambassador Sebastianus menjelaskan peran TNI ke dalam 5 (lima) periode paska kemerdekaan Indonesia yaitu periode 1945-1950, 1950-1959, 1959 - 1966, 1966 - 1998, dan 1998 - sekarang.

Diskusi ditutup dengan *sharing session* mengenai penyelenggaraan program pendidikan di Lemhannas RI dan NMC. Turut hadir dalam diskusi Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Lemhannas RI Mayjen TNI Asrobudi, Dirjian Hankam Debidjianstrat Lemhannas RI Marsma TNI Ade Dian Suryacandra, M.Sc., beserta pejabat struktural Lemhannas RI.

Penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LV Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi menutup Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV di Ruang Dwiwarna Purwa, Lemhannas RI pada Rabu (9/11). Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Deputy Pendidikan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan, Mantan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ermaya Suradinata dan Prof. Dr. Muladi, S.H., Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Sekjen Wantannas RI, Direktur SDM dan Umum BPJS kesehatan, Atase Pertahanan Papua Nugini untuk Indonesia, serta Atase Pertahanan Timor Leste.

Acara penutupan diawali oleh orasi Menteri Luar Negeri RI ke-16, Dr. Nur Hassan Wirajuda mengenai tatanan regional dan keberlangsungan hidup negara bangsa. Mengawali orasi tersebut, Hassan Wirajuda memaparkan bahwa globalisasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dan menyebabkan terciptanya ketergantungan antar negara.

Adanya kemajuan teknologi juga semakin membuat dunia terasa seperti sebuah "kampung kecil" dengan batas-batasnya negara yang semakin kabur atau "borderless". Globalisasi, lanjut Hassan Wirajuda, dapat memberikan manfaat dan juga merugikan bagi Indonesia. Semua bergantung pada kemampuan Bangsa Indonesia untuk merapatkan sisi domestik dengan sisi internasional yang disebut dengan "Faktor Intermestik".

Selain itu, manfaat globalisasi juga dapat ditentukan dengan kemampuan bersaing dan inovasi. Semakin jauh sisi domestik dan sisi internasional dapat mengakibatkan adanya efek buruk dari globalisasi bagi rakyat.

Hassan Wirajuda menjelaskan lebih lanjut bahwa globalisasi menyebabkan adanya regionalisme dalam berbagai bidang seperti adanya organisasi ekonomi antar negara seperti adanya satu komisi perdagangan yang mewakili negara-negara Eropa. Ketika proses globalisasi dilakukan antar kawasan, maka tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Indonesia, dalam hal ini, terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain. Hassan Wirajuda menambahkan bahwa efek dari globalisasi adalah tidak adanya tatanan dunia yang memadai yang disetujui oleh seluruh negara di dunia.

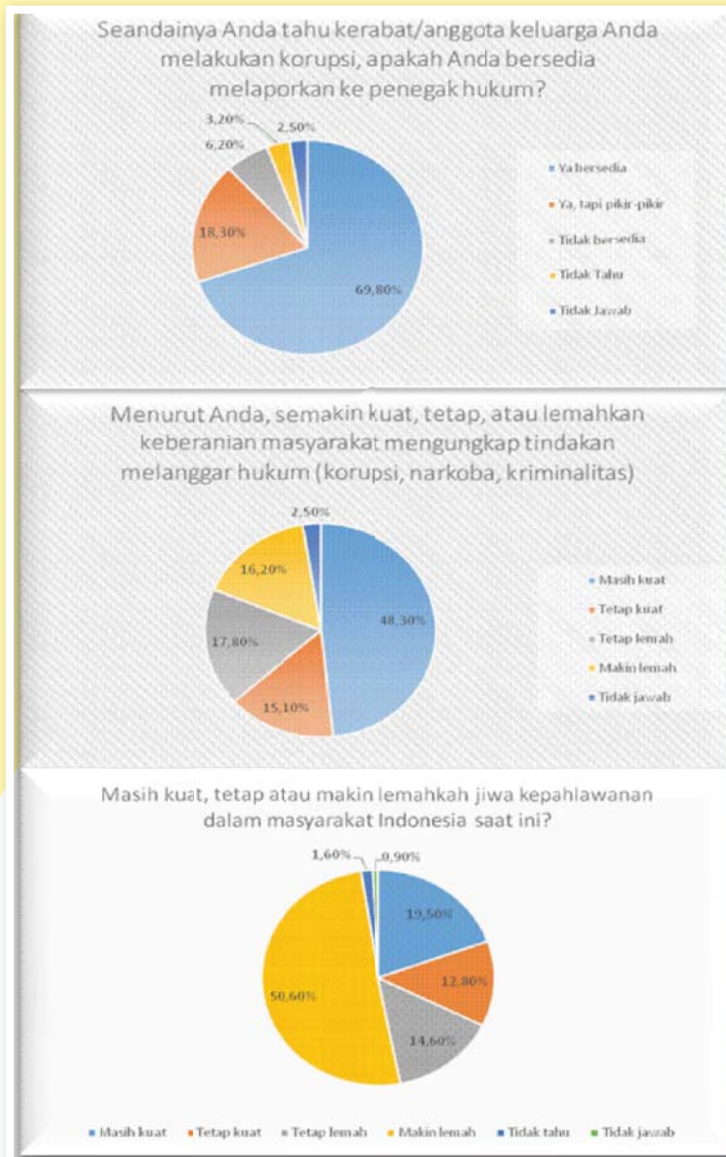
Pada akhir orasinya Hassan Wirajuda berharap Lemhannas RI nantinya tidak hanya mengkaji mengenai ketahanan nasional dalam konteks nasional saja namun juga dalam konteks globalisasi. Hassan Wirajuda juga berharap pembekalan ini dapat berguna bagi para alumni PPRA LV Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI dalam pidato penutupan mengatakan, dengan menempuh pendidikan di Lemhannas RI, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin negarawan yang handal dalam pemecahan masalah strategis di tingkat nasional, regional, dan internasional. Agus Widjojo menambahkan bahwa tempat mengabdikan sebenarnya adalah di instansi tempat para peserta bekerja. Dalam

lingkungan tersebut, masalah yang akan timbul adalah masalah-masalah yang tidak dapat ditunda dan harus ditemukan segera solusinya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI memberikan penghargaan capaian akademik terbaik kepada Kolonel Inf Tri Yulianto S. Ap., M. Si.; penghargaan capaian kertas karya perseorangan terbaik kepada Kolonel Inf Safriadi, S.IP; serta penghargaan prestasi akademik terbaik untuk peserta negara sahabat kepada Letnan Kolonel Pengiran Asmani dari Brunei Darussalam.





Lemhannas RI Selenggarakan Jajak Pendapat mengenai Nilai-Nilai Kepahlawanan

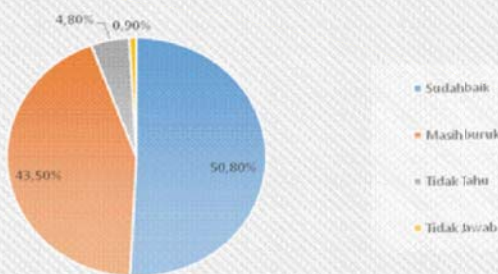
Dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2016, Lemhannas RI menyelenggarakan jejak pendapat mengenai nilai-nilai kepahlawanan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Jejak pendapat tersebut dilakukan untuk mengetahui Nilai-Nilai Kepahlawan yang ada dalam masyarakat Indonesia di tengah-tengah modernisasi dan kemajuan jaman karena tidak dapat dipungkiri bahwa semangat nilai-nilai kepahlawanan seharusnya tidak hilang dan harus terus berkembang dan bertransformasi.

Berdasarkan hasil polling jajak pendapat yang telah dilakukan

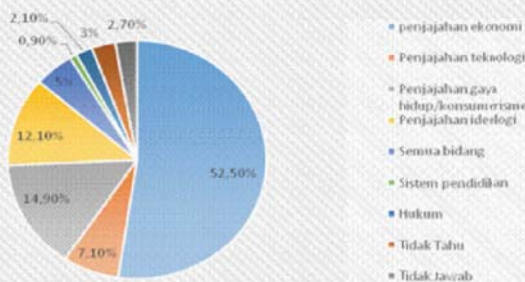
oleh Lemhannas RI pada tanggal 22 s.d 24 Oktober 2016, terdapat penurunan nilai-nilai kepahlawanan dalam masyarakat dan juga penurunan kepercayaan publik terhadap *elite* politik dan *elite* pemerintahan dalam menjiwai arti nilai-nilai kepahlawanan tersebut. Pada sisi lain masih ada keresahan bangsa ini terhadap fenomena “penjajahan baru” di bidang ekonomi yang terus menggerus kedaulatan dan kemandirian ekonomi rakyat.

Dalam polling jajak pendapat ini, terdapat beberapa variabel pokok yang diukur seperti patriotisme, nasionalisme, rela berkorban, berani membela kebenaran, hingga berani melaporkan terhadap

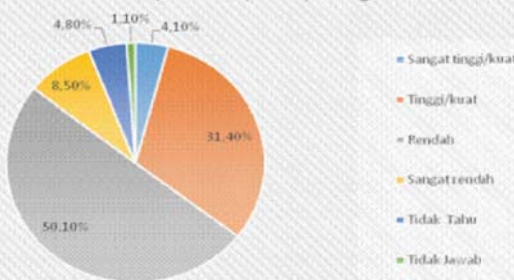
Menurut Anda sudah baik atau masih burukkan teladan sikap kepahlawanan dari elite pemerintahan?



Penjajahan apakah yang masih dialami bangsa Indonesia saat ini?



Menurut Anda, seberapa kuat/tinggi jiwa/nilai kepahlawanan dalam profesi aparat penegak hukum?



hasil pengolahan data, sebanyak 50,1% responden menilai bahwa nilai-nilai kepahlawanan dalam profesi aparat penegak hukum masih rendah dan belum dapat membuat publik percaya terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, lemahnya jiwa kepahlawanan aparat penegak hukum karena adanya sekat pada rumitnya pembudayaan sadar hukum dengan masyarakat.

Meskipun terjadi penurunan nilai-nilai kepahlawanan dalam masyarakat dan elite politik maupun para aparatur penegak hukum sebagaimana tertuang di atas, pada sisi lain jajak pendapat juga menemukan fakta tentang cukup besarnya keberanian masyarakat untuk melaporkan berbagai tindak kriminal. Tercatat sebanyak 48% responden menyatakan keberaniannya dalam mengungkap berbagai tindakan melanggar hukum (korupsi, narkoba, dan kriminalitas).

Di sisi lain, sikap kepahlawanan dalam keluarga ternyata memperlihatkan hasil yang bertolak belakang dengan melemahnya sikap kepahlawanan pada aparat penegak hukum dan elite politik. Hal itu terlihat dari keberanian masyarakat untuk melaporkan ke penegak hukum jika keluarga/ kerabatnya terlibat dalam korupsi yang persentasenya mencapai 69,8%. Hal yang sama juga terlihat pada hasil *polling* jiwa kepahlawanan pada elite pemerintahan. Responden menilai bahwa citra nilai kepahlawanan dalam elite pemerintahan masih cukup baik, dimana sebanyak 50,8% responden menganggap bahwa elite pemerintahan masih bisa dijadikan teladan. Artinya masih ada pengakuan kepercayaan responden terhadap budaya dan kinerja pemerintah.

Selain itu, dalam jajak pendapat ini juga mengungkapkan sebesar 52,2% responden dari 437 responden di 12 provinsi menyatakan bahwa terdapat bentuk penjajahan masa kini dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya dominasi ekonomi oleh pihak asing merupakan salah satu bentuk penjajahan baru. Selain hal tersebut di atas, hasil jajak pendapat juga mengungkap sebanyak 14,9% responden yang mengemukakan bahwa penjajahan masa kini adalah penjajahan gaya hidup/ konsumerisme. Sedangkan sebanyak 12,1% responden menganggap bahwa penjajahan masa kini adalah penjajahan ideologi.

Kemudian, berdasarkan data Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas (Labkurtannas) RI menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketahanan ideologi di 12 Provinsi pada tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Maka dari itu, berdasarkan hasil *polling*/jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional RI secara umum menyiratkan perlu hadirnya peran negara yang lebih intensif dalam menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada segenap elemen bangsa melalui metode yang perlu dicari kesesuaiannya dengan kemajuan jaman.

berbagai hal yang melanggar hukum kepada yang berwajib. Variabel-variabel tersebut dapat menggambarkan sifat dan nilai kepahlawanan yang saat ini berkembang dalam masyarakat.

Secara umum hasil jajak pendapat yang dilakukan mendapatkan fakta, bahwa nilai-nilai kepahlawanan pada elite politik masih lemah, sebanyak 46,2% responden mengungkapkan bahwa nilai-nilai kepahlawanan dalam profesi tokoh politik/ anggota DPR masih lemah.

Selain itu, nilai-nilai kepahlawanan dalam masyarakat juga masih lemah dengan presentase 50,6% responden yang mengungkapkan hal ini.

Lemahnya jiwa kepahlawanan tersebut juga terjadi pada aparat penegak hukum yang ditunjukkan dengan adanya 50,1% responden mengakui hal yang mengindikasikan perilaku para penegak hukum yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Fakta melemahnya jiwa kepahlawanan tersebut, ternyata juga terjadi pada aparatur penegak hukum dan juga elite politik. Dari

Upacara Peringatan Hari Pahlawan

“Semangat Kepahlawanan adalah semangat persatuan, persatuan yang bulat-mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Semangat Kepahlawanan adalah semangat membentuk dan membangun negara,” jelas Menteri Sosial RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. selaku inspektur upacara memperingati Hari Pahlawan pada Kamis (10/11).

Dalam sambutannya, Menteri Sosial RI mengatakan bahwa setiap zaman memiliki tantangannya tersendiri. Oleh karena itu, setiap zaman harus mengembangkan respon kepahlawanan yang sesuai dengan zamannya. Setelah Indonesia merebut kemerdekaannya, Semangat Kepahlawanan tersebut tidak cukup hanya dengan mempertahankan patriotisme defensif, namun butuh patriotisme yang lebih positif dan progresif.

Kemudian, dalam rangka mencapai perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, patriotisme progresif harus mengembangkan ketahanan bangsa untuk bisa mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan orientasi Trisakti tersebut, jelas Menteri Sosial RI, Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil presiden H.M. Jusuf Kalla hadir dengan menawarkan VISI transformatif: “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan

gotong-royong.”

Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan sembilan agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut NAWA CITA. Kesembilan agenda prioritas itu bisa dikategorisasikan ke dalam tiga ranah; ranah mental-kultural, ranah material (ekonomi) dan ranah politik.

Selain itu, salah satu agenda NAWA CITA yaitu revolusi mental diharapkan dapat mendorong Gerakan Hidup Baru, dalam bentuk perombakan cara berfikir, cara kerja, cara hidup, yang merintangikan kemajuan dan peningkatan dan pembangunan cara berfikir, cara kerja, dan cara hidup yang baik. Itulah jiwa patriotisme progresif yang harus dikobarkan dalam menghadapi tantangan dan persoalan pembangunan hari ini.

Selain itu melalui Peringatan Hari Pahlawan 2016 Bangsa Indonesia harus menjadi Bangsa yang besar dengan menghargai jasa para pahlawannya, Peringatan Hari Pahlawan diharapkan pula dapat lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuhkan-kembangkan Nilai-nilai Kepahlawanan serta meningkatkan kecintaan kepada tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upacara yang dilakukan di lapangan tengah Lemhannas RI dihadiri oleh Pejabat Struktural Lemhannas RI, Tenaga Profesional, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan seluruh Staf Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas RI